

ABSTRAK

Sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia mengekspor sejumlah produk olahan nikel seperti Nikel Matte, FeNi, dan NPI. Tingginya ekspor tersebut membuat deplesi cadangan bahan tambang tersebut menjadi semakin tinggi. Guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Indonesia memberlakukan *mineral conservation policy* yang bertujuan memanfaatkan secara maksimum dan seefisien mungkin sumber daya mineral yang dimiliki. Sejalan dengan itu dilakukan pembaruan hukum pertambangan dengan mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam yang selama ini hanya “gali-ekspor” dengan paradigma peningkatan nilai tambah. Diantaranya, ketentuan Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, mewajibkan pelaku usaha pertambangan melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Kewajiban tersebut dalam implementasinya menghadapi berbagai permasalahan yuridis seperti inkonsistensi peraturan perlaksanaannya, ketidakpastian hukum, dan dualisme kewenangan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian dalam memfasilitasi kebijakan kegiatan pengolahan dan pemurnian (*smelter*) nikel. Lebih dari itu, terdapat tekanan internasional terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan dualisme pengaturan *smelter* nikel dan implementasinya untuk membangun kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris untuk menverifikasi temuan penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa kewenangan perizinan *smelter* nikel seharusnya berada di bawah Kementerian Perindustrian demi kelangsungan industri keterkaitan ke depan (*linkage forward industry*).

Keywords: pertambangan, izin, pengolahan dan pemurnian, nikel.

ABSTRACT

As the world largest Nickel producer, Indonesia exports refined nickel products such as Nickel Matte, FeNi and NPI. The increasing number of exports will boost the rate of reserve depression of nickel mineral, caused particularly by regulation of nickel processing and refining. In order to enhance people's welfare as mandated by Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Constitution, the proper policy on mineral conservation, in the sense of maximum efficient and best possible utilization of existing mineral resources is urgently needed. Accordingly, Mining Law was amended by changing the paradigm of natural resource management which so called "Dig – Export" toward the paradigm of increasing its added value. Article 102, Article 103, and Article 104 of Law Number 4 of 2009 concerning Minerals and Coals, defined new obligations for mining business to do processing and refining in Indonesia. In fact, this obligation encounter various polemics over juridical issues such as inconsistency on policy and implementation. In addition, revision of laws and regulations affect legal uncertainty, as well as dualism on the authority of The Ministry of Energy and Mineral Resources and The Ministry of Industry for the same nickel smelter processing and refining facilities. This research focus on analysing the dualism of the regulations and its impacts on legal certainty, justice, and benefits. The research method is normative juridical research verified by empirical research. The research found that the licensing authority of nickel smelter should be under Ministry of Industry for the continuity of linkage forward industry.

Keywords: mining, permits, processing and refining, nickel